

BAB II

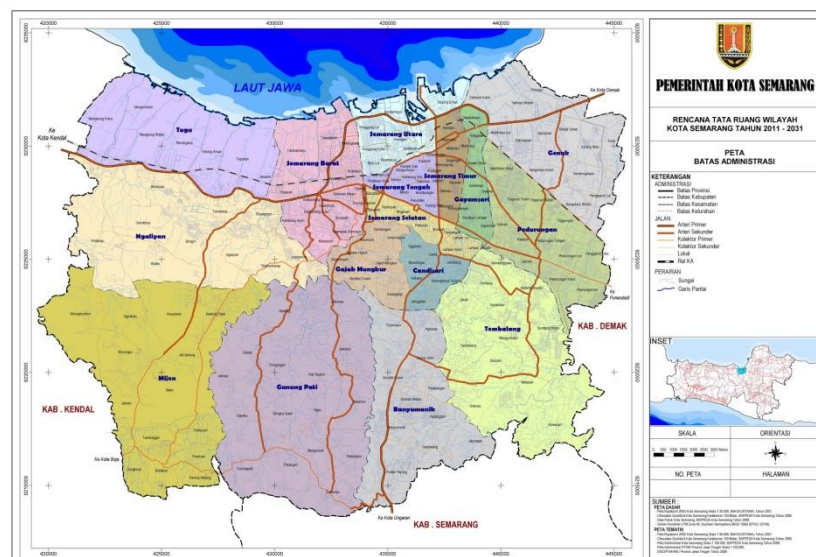
GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KOTA SEMARANG

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai deskripsi dari lokasi yang menjadi objek penelitian. Dalam bab ini terdapat 3 (tiga) sub – bab, yakni : (1) Gambaran umum lokasi penelitian, (2) Gambaran umum Pegawai Pemerintah Kota Semarang, (3) Gambaran umum subjek penelitian yaitu Pegawai Sekretariat Daerah Kota Semarang, (4) Gambaran umum program aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Berbasis Teknologi Kota Semarang (Simpatik).

2.1. Kota Semarang

2.1.1. Kondisi Geografis Kota Semarang

Gambar 2.1
Peta Wilayah Kota Semarang



Sumber: Disperakim Provinsi Jawa Tengah

Kota Semarang terletak antara garis 6° 50' - 7° 10' Lintang Selatan dan garis 109° 35' - 110° 50' Bujur Timur. Dibatasi sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal, sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Demak, sebelah Selatan berbatasan dengan kabupaten Semarang dan sebelah Utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai meliputi 13,6 km.¹

Berdasarkan wilayah administrasi, Luas wilayah Kota Semarang tercatat 373,70 km². Kota Semarang terbagi menjadi 16 wilayah kecamatan dan 177 wilayah kelurahan. Wilayah kecamatan terdiri atas 2 kecamatan terluas dan terkecil. Kecamatan terluas yaitu Kecamatan Mijen dengan luas wilayahnya yaitu 57,55 km² dan Kecamatan Gunungpati yaitu 54,11 km². Sementara kecamatan terkecil yaitu Kecamatan Semarang Selatan dengan luas wilayahnya yaitu 5,928 km² dan Kecamatan Semarang Tengah luas wilayahnya yaitu 6,14 km². Tabel berikut ini membandingkan luas wilayah Kota Semarang dan luas masing-masing per kecamatan beserta jumlah kelurahan yang ada di Kota Semarang:

Tabel 2.1
Luas Wilayah di Kota Semarang

No.	Kecamatan	Luas Wilayah/Area (km)	Presentase (%)	Jumlah Kelurahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Mijen	57,55	15,4	14
2.	Gunungpati	54,11	14,48	16
3.	Banyumanik	25,69	6,87	11

¹ Laman resmi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. http://si.disperakim.jatengprov.go.id/umum/detail_kondisi_geo/18. Diakses pada hari Minggu, 8 Maret 2020 pukul 01.37 WIB.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Gajah Mungkur	9,07	2,43	8
5.	Semarang Selatan	5,93	1,59	10
6.	Candisari	6,54	1,75	7
7.	Tembalang	44,2	11,83	12
8.	Pedurungan	20,72	5,54	12
9.	Genuk	27,39	7,33	13
10.	Gayamsari	6,18	1,65	7
11.	Semarang Timur	7,7	2,06	10
12.	Semarang Utara	10,97	2,94	9
13.	Semarang Tengah	6,14	1,64	15
14.	Semarang Barat	21,74	5,82	16
15.	Tugu	31,78	8,5	7
16.	Ngaliyan	37,99	10,17	10
Kota Semarang		373,7	100	177

(Sumber: BPS Kota Semarang, diolah 2016)

2.1.2. Kondisi Demografis Kota Semarang

Menurut data yang dihimpun dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, pertumbuhan penduduk di Kota Semarang 4 (empat) tahun terakhir yaitu tahun 2016 sampai 2019 selalu mengalami peningkatan. Kota Semarang merupakan salah satu kota metropolitan yang paling padat penduduknya. Berikut ini data yang menyajikan jumlah penduduk Kota Semarang tahun 2016 -2019:

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Kota Semarang Tahun 2016 – 2019

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	2016	1.648.279
2	2017	1.658.552
3	2018	1.668.578
4	2019	1.674.358

Sumber: Dispendukcapil Kota Semarang, diolah 2019

Berdasarkan tabel 2.2, diketahui bahwa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir jumlah penduduk di Kota Semarang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan paling besar terjadi pada tahun 2019 yaitu sebanyak 1.674.358 jiwa. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Semarang mengalami peningkatan yang signifikan.

Kota Semarang merupakan pusat perdagangan, pusat industri, pusat pertumbuhan, simpul distribusi, dan pusat permukiman atau daerah modal. Hal ini dapat ditunjukkan dengan perkembangan berbagai fasilitas, sarana dan prasarana. Secara logis, tentu saja dipengaruhi oleh laju pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat jika dibandingkan dengan wilayah yang berada diluarnya. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi menyebabkan semakin terbukanya kesempatan kerja baru sehingga meningkatkan jumlah penduduk Kota Semarang dari tahun ke tahun.²

2.1.3. Pemerintahan

Kota Semarang merupakan ibukota sekaligus pusat pemerintahan Provinsi Jawa Tengah memiliki visi dan misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021. Visi dan misi ini akan menjadi arahan pembangunan Kota Semarang

² Etty Soesilowati, "Dampak Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang Terhadap Kemacetan Lalu Lintas di Wilayah Pinggiran dan Kebijakan yang Ditempuhnya", Universitas Negeri Semarang, Vol 1, No. 1, Tahun 2008

selama lima tahun yang akan datang dan terjabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang lebih khusus dan terfokus.³

Visi pembangunan daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021 berdasarkan visi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih adalah sebagai berikut :

**“Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju
Masyarakat Semakin Sejahtera”**

Visi tersebut mengandung maksud bahwa Semarang sebagai kota metropolitan berwawasan lingkungan akan menjadi kota yang handal dan maju dalam perdagangan dan jasa, dengan dukungan infrastuktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan politik, keamanan, sosial, ekonomi, dan budaya.

Untuk mewujudkan Visi “Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera” dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

Misi 1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas, yaitu pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi serta menjunjung tinggi budaya asli Kota Semarang.

Misi 2. Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Meningkatkan Pelayanan Publik, yaitu penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, efektif,

³ Buku Perubahan RPJMD Kota Semarang 2016 -2021. Bab V Halaman V-1 s.d V-5

efisien dan akuntabel dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang disertai dengan penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Misi 3. Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan, yaitu pembangunan diprioritaskan pada optimalisasi pemanfaatan tata ruang dan peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah yang terencana, selaras, serasi, seimbang dan berkeadilan dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Misi 4. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha yang Kondusif, yaitu pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kemampuan perekonomian daerah dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, berorientasi pada ekonomi kerakyatan dan sektor ekonomi basis yang mempunyai daya saing baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional serta meningkatkan investasi pada sektor industri besar untuk menyerap tenaga kerja yang didukung oleh keberadaan kawasan berikat, kawasan industri dan pergudangan serta dibangunnya sentra-sentra industri kecil dan rumah tangga.

Pesan mendasar visi yang dijabarkan dalam misi-misi pembangunan Kota Semarang dalam waktu lima tahun kedepan adalah untuk membuat masyarakat semakin sejahtera, maka upaya untuk menjalankan pemerintahan berlandaskan prinsip-prinsip *good governance*,

meningkatkan pelayanan publik, pengembangan kehidupan berdemokrasi, pemerataan dan keadilan harus benar-benar dilaksanakan secara konsisten di Kota Semarang.

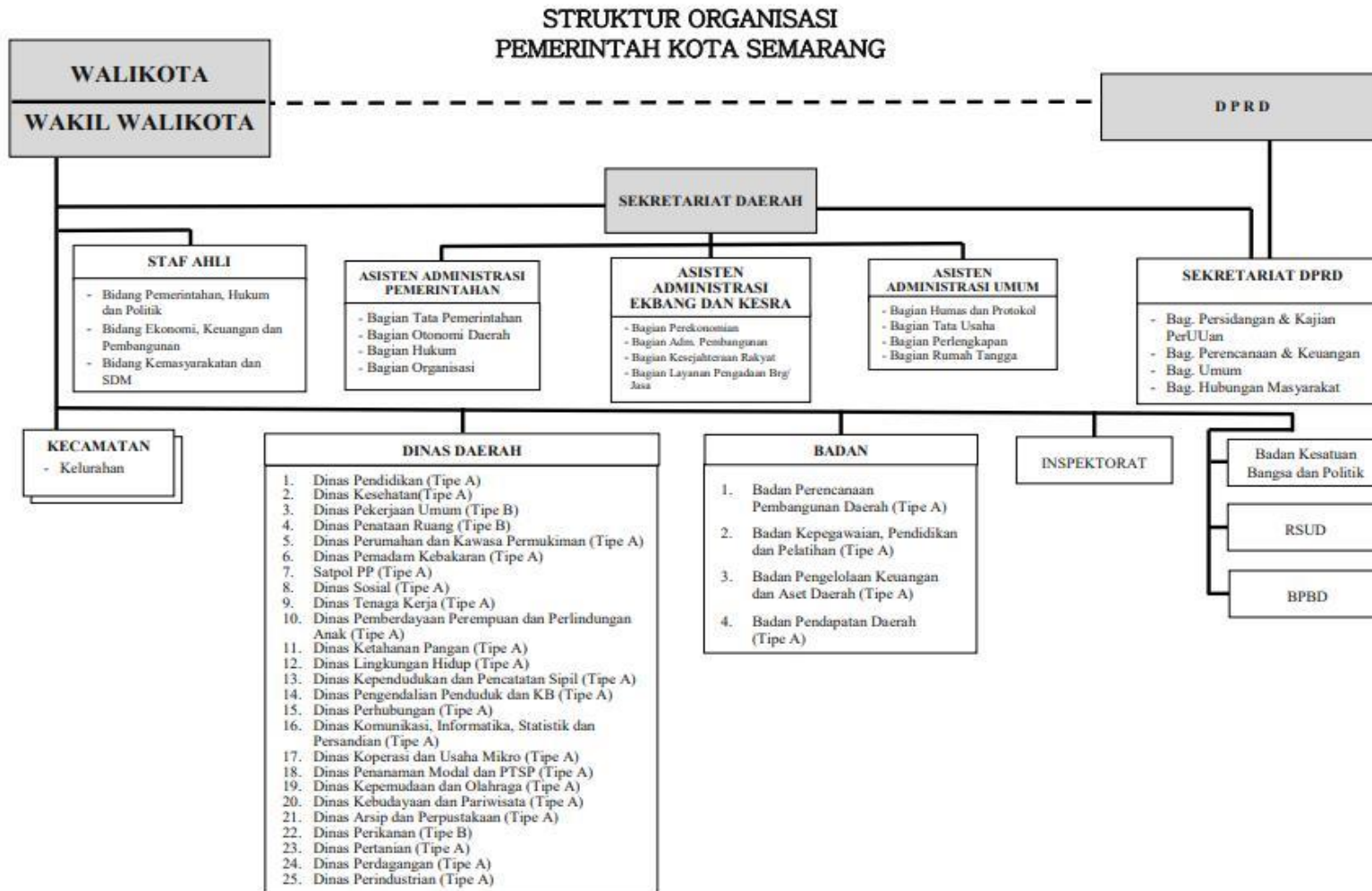
2.2. Pegawai Pemerintah Kota Semarang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan sangat tergantung pada kesempurnaan pegawai pemerintahan, oleh karena itu untuk mewujudkan pegawai pemerintah yang profesional guna mewujudkan pelayanan publik yang optimal maka dibutuhkan pelayanan kepegawaian yang cepat dan memudahkan pegawai untuk melaksanakan tugasnya.

Kota Semarang terbagi menjadi 16 wilayah kecamatan, 177 wilayah kelurahan, dan 10.352 Rukun Tetangga. Pelaksanaan tugas pemerintahan Kota Semarang dipimpin oleh Walikota dan Wakil Walikota, yang dibantu oleh Sekretaris Daerah dan 3 Staf Ahli. Sekretaris Daerah membawahi 3 Asisten Sekretariat Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional. Walikota membawahi 25 Kepala Dinas, 4 Kepala Badan, 1 Kepala Inspektorat, 1 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 1 kepala RSUD, 1 Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Kota Semarang



2.2.1. Jumlah Pegawai Pemerintah Kota Semarang

Kota Semarang memiliki 51 Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing untuk menjalankan pemerintahan dan pelayanan yang ditujukan kepada masyarakat dengan total Aparatur Sipil Negara yaitu 10.649, dengan kualifikasi sebagai berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai ASN Kota Semarang Periode November 2019

No	Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	82
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	24
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	48
4	Badan Pendapatan Daerah	119
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	76
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	63
7	Dinas Arsip dan Perpustakaan	43
8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	98
9	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	78
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	95
11	Dinas Kesehatan	1179
12	Dinas Ketahanan Pangan	46
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	46
14	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	43
15	Dinas Lingkungan Hidup	135
16	Dinas Pekerjaan Umum	142
17	Dinas Pemadam Kebakaran	84
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	45

(1)	(2)	(3)
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	61
20	Dinas Penataan Ruang	96
21	Dinas Pendidikan	5037
22	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	36
23	Dinas Perdagangan	246
24	Dinas Perhubungan	125
25	Dinas Perikanan	30
26	Dinas Perindustrian	40
27	Dinas Pertanian	85
28	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	170
29	Dinas Sosial	46
30	Dinas Tenaga Kerja	56
31	Inspektorat	63
32	Kecamatan Banyumanik	87
33	Kecamatan Candisari	51
34	Kecamatan Gajahmungkur	61
35	Kecamatan Gayamsari	58
36	Kecamatan Genuk	80
37	Kecamatan Gunungpati	94
38	Kecamatan Mijen	90
39	Kecamatan Ngaliyan	78
40	Kecamatan Pedurungan	100
41	Kecamatan Semarang Barat	101
42	Kecamatan Semarang Selatan	73
43	Kecamatan Semarang Tengah	101
44	Kecamatan Semarang Timur	67
45	Kecamatan Semarang Utara	63
46	Kecamatan Tembalang	82
48	Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T Wongsonegoro	439
49	Satuan Polisi Pamong Praja	160

(1)	(2)	(3)
50	Sekretariat Daerah	226
51	Sekretariat DPRD	48
Jumlah ASN di Kota Semarang		10649

sumber: BKPP Kota Semarang, diolah 2019

Berdasarkan tabel 2.3 jumlah Pegawai Pemerintah Kota Semarang di atas menjelaskan bahwa jumlah Pegawai Pemerintah Kota Semarang periode bulan November 2019 tercatat sebesar 10.649 orang. Di dalam 51 organisasi perangkat daerah terdapat 2 OPD yang memiliki jumlah pegawai yang terbesar dan terkecil.

Salah satu OPD yang memiliki jumlah pegawai terbesar adalah Dinas Pendidikan dengan jumlah pegawai yaitu 5.037 orang, hal ini didukung karena Dinas Pendidikan Kota Semarang mempunyai tugas pokok dibidang pendidikan sehingga dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan teknis operasional dibutuhkan tenaga pendidik yang memadai dan tersebar di seluruh jenjang pendidikan dan pelayanan umum kepada masyarakat. Sedangkan OPD yang memiliki jumlah pegawai terkecil adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan jumlah pegawai 24 orang.

2.2.2. Rekap Usia Pegawai Pemerintah Kota Semarang

Usia berkaitan dengan pendidikan formal dan masa kerja yang dimiliki dalam pengembangan karir PNS. Usia juga menentukan kapan seorang PNS dapat memulai jenjang karirnya dan tergantung pendidikan terakhir yang diperoleh. Untuk pendidikan SLTA pengangkatan pertama

berusia 18 tahun, D2 pengangkatan pertama berusia 20 tahun, D3 pengangkatan pertama berusia 21 tahun, S1/D4 pengangkatan pertama berusia 23 tahun, S2 pengangkatan pertama berusia 25 tahun, S3 pengangkatan pertama berusia 27 tahun.

Berdasarkan Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil, PNS yang akan mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) sebelum diberhentikan dengan hormat dapat mengambil masa persiapan pensiun dan dibebaskan dari jabatan ASN paling lama satu tahun. Batas Usia Pensiun sebagaimana yang dimaksud yaitu 58 tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan, 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya, serta 65 tahun bagi pejabat fungsional ahli utama.

Mengenai rekap usia Pegawai Pemerintah Kota Semarang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 2.4
Rekap Usia Pegawai Pemerintah Kota Semarang
Periode November 2019

No	Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	21 – 30 tahun	179	455	634
2	31 – 40 tahun	633	1025	1658
3	41 – 50 tahun	1190	1643	2833

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	51 – 60 tahun	2492	3028	5520
5	61 – 65 tahun	1	3	4
Jumlah		4495	6154	10649

sumber data: BKPP Kota Semarang, diolah 2019

Berdasarkan tabel 2.4 rekap usia pegawai Pemerintah Kota Semarang di atas menjelaskan bahwa usia ASN di Kota Semarang periode bulan November tahun 2019 yang paling banyak adalah rentang usia 51 sampai 60 tahun dengan jumlah sebesar 5.520 orang yang didominasi oleh ASN perempuan sejumlah 3.028 orang. Sedangkan rentang usia yang paling sedikit adalah usia diantara 61 sampai 65 tahun dengan jumlah 4 orang yang juga didominasi oleh ASN perempuan sebanyak 3 orang. Usia juga menentukan masa kerja dan pengalaman seorang ASN. Dengan tabel yang ditujukan tersebut, sebagian besar ASN Pemerintah Kota Semarang memiliki masa kerja yang cukup lama.

2.2.3. Rekap Pendidikan Pegawai Pemerintah Kota Semarang

Keberhasilan jalannya pemerintahan sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia. Kualitas tersebut dapat diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pembinaan. Hal tersebut sangat penting untuk mengembangkan potensi pegawai Pemerintah Kota Semarang agar mampu beradaptasi dengan perubahan, mampu melaksanakan pembangunan yang berorientasi kepada masyarakat secara adil, aspiratif dan konsisten, serta mampu mengatasi kendala dan masalah yang akan terjadi.

Dalam organisasi Pemerintah Kota Semarang, pendidikan menjadi latar belakang seorang ASN untuk mendapatkan jabatan dan pangkatnya. Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002. Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sampai dengan:

- a) Pengatur Muda, golongan ruang II/a bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar
- b) Pengatur, golongan ruang II/c bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
- c) Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Pertama
- d) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas 3 Tahun, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas 4 Tahun, Ijazah Diploma I, atau Ijazah Diploma II
- e) Penata, golongan ruang III/c bagi yang memiliki Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Ijazah Diploma III, Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi atau Ijazah Bakaloreat
- f) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d bagi yang memiliki Ijazah Sarjana (S1), atau Ijazah Diploma IV

- g) Pembina, golongan ruang IV/a bagi yang memiliki Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, dan Ijazah Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara
- h) Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b bagi yang memiliki Ijazah Doktor (S3)

Mengenai rekap pendidikan Pegawai Pemerintah Kota Semarang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 2.5
Rekap Pendidikan Pegawai Pemerintah Kota Semarang
Periode November 2019

No	Dasar Pendidikan	Jumlah
1	Sekolah Dasar (SD)	95
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	191
3	Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/K)	1958
4	Diploma I (D1)	32
5	Diploma II (D2)	642
6	Diploma III (D3)	944
7	Sarjana (S1) / Diploma IV (D4)	6013
8	Magister (S2)	767
9	Doktor (S3)	7
Jumlah		10649

sumber: BKPP Kota Semarang, diolah 2019

Berdasarkan tabel 2.5 rekap pendidikan Pegawai Pemerintah Kota Semarang di atas menjelaskan bahwa pendidikan terakhir ASN Pemerintah Kota Semarang periode bulan November tahun 2019 yang paling banyak adalah tingkat pendidikan terakhir Sarjana (S1)/Diploma IV (D4)

sebanyak 6.013 orang. Sedangkan tingkat pendidikan ASN yang paling sedikit adalah Doktor (S3) sebanyak 7 orang.

2.2.4. Rekap Jabatan dan Pangkat Pegawai Pemerintah Kota Semarang

Dalam struktur organisasi Pemerintah Kota Semarang, terdapat tingkatan jabatan untuk Aparatur Sipil Negara. Karir ASN ditetapkan dengan adanya pola karir yang merupakan pola pembinaan ASN yang menggambarkan alur pengembangan karir dan menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara unsur-unsur karir. Dalam menyusun pola karir dilakukan dengan meliputi pendidikan formal, diklat jabatan, usia, masa kerja, pangkat atau golongan ruang, tingkat jabatan, pengalaman jabatan, penilaian prestasi kerja, dan kompetensi jabatan.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002. Tingkatan jabatan tersebut diantaranya:

- 1) Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
- 2) Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

- 3) Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian tertentu dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

Sebagai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah Kota Semarang harus memiliki pengetahuan dan keahlian untuk melaksanakan tugasnya dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga untuk menghindari adanya tumpang tindih tugas dan wewenang, setiap ASN diberikan pangkat dan jabatan. Pangkat juga berfungsi sebagai kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang ASN dalam rangkaian susunan kepegawaian serta digunakan sebagai dasar penggajian.

Setiap jabatan dan pangkat ASN dapat berpindah naik ke jabatan dan pangkat yang lebih tinggi sesuai dengan masa kerja dan hasil penilaian kinerja PNS di bawah kewenangan pejabat yang berwenang pada instansi pemerintahan dan disetujui oleh Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pasal 47 huruf b. Setiap jabatan struktural di Indonesia memiliki tingkatan yang disebut eselon. Masa kenaikan pangkat ASN ditetapkan tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun, kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian. Mengenai pangkat dan

golongan ruang Pegawai Pemerintah Kota Semarang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 2.6
Rekap Golongan Ruang Pegawai Pemerintah Kota Semarang
Periode November 2019

No	Golongan Ruang	Jumlah
1	I/a (Juru Muda)	0
2	I/b (Juru Muda Tingkat I)	0
3	I/c (Juru)	43
4	I/d (Juru Tingkat I)	73
5	II/a (Pengatur Muda)	150
6	II/b (Pengatur Muda Tingkat I)	195
7	II/c (Pengatur)	739
8	II/d (Pengatur Tingkat I)	407
9	III/a (Penata Muda)	1528
10	III/b (Penata Muda Tingkat I)	1727
11	III/c (Penata)	1365
12	III/d (Penata Tingkat I)	1588
13	IV/a (Pembina)	2479
14	IV/b (Pembina Tingkat I)	263
15	IV/c (Pembina Utama Muda)	80
16	IV/d (Pembina Utama Madya)	10
17	IV/e (Pembina Utama)	2
Jumlah		10649

sumber: BKPP Kota Semarang, diolah 2019

Berdasarkan tabel 2.6 rekap golongan ruang Pegawai Pemerintah Kota Semarang di atas menjelaskan bahwa golongan ruang ASN Pemerintah Kota Semarang periode bulan November tahun 2019 yang paling banyak adalah golongan IV/a atau Pembina yaitu sebanyak 2.479 orang Sedangkan golongan ruang yang paling sedikit adalah golongan IV/e sebanyak 2 orang. Mengenai Pegawai Pemerintah Kota Semarang sesuai eselon, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 2.7
Rekap Jabatan Pegawai Pemerintah Kota Semarang Sesuai Eselon
Periode November 2019

No	Jabatan Eselon	Jumlah
1	Pimpinan Tinggi (I/a, I/b, II/a, II/b)	35
2	Administrator (III/a, III/b)	209
3	Pengawas (IV/a, IV/b)	1573
4	Pelaksana (Jabatan Fungsional Umum)	3003
5	Fungsional (Jabatan Fungsional Tertentu)	5829
Jumlah		10649

sumber: BKPP Kota Semarang, diolah 2019

Berdasarkan tabel 2.7 rekap jabatan Pegawai Pemerintah Kota Semarang berdasarkan eselon di atas menjelaskan bahwa jabatan eselon

ASN Pemerintah Kota Semarang periode bulan November tahun 2019 yang paling banyak adalah jabatan fungsional tertentu sebanyak 5.829 orang, jabatan fungsional tertentu atau pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri contohnya adalah dosen, guru, dokter dan lain sebagainya. Sedangkan jabatan eselon yang paling sedikit adalah pimpinan tinggi yang terdiri dari golongan I/a, I/b, II/a, dan II/b sebanyak 35 orang.

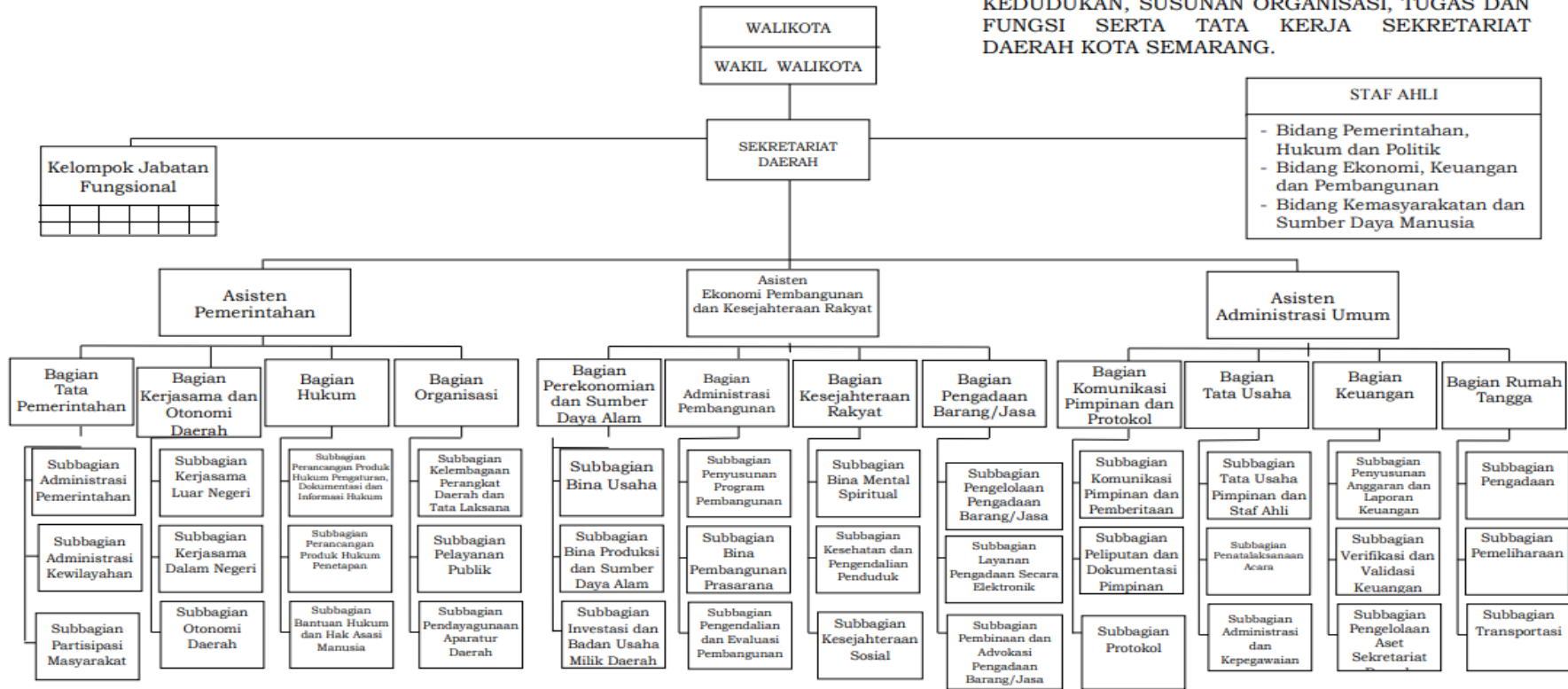
2.3. Pegawai Sekretariat Daerah Kota Semarang

Sekretariat daerah kota adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah kota, yang dipimpin oleh sekretaris daerah. Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sekretariat Daerah kota mempunyai tugas membantu wali kota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Gambar 2.3 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 2020
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH KOTA SEMARANG.



WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI

2.3.1. Tugas Sekretariat Daerah Kota Semarang

Sekretariat Daerah Kota Semarang mempunyai tugas membantu walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Sekretariat Daerah Kota Semarang beralamat di Jalan Pemuda No. 148, Sekayu.

2.3.2. Fungsi Sekretariat Daerah Kota Semarang

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Daerah Kota Semarang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan daerah
- b. penyelenggaraan koordinasi penyusunan kebijakan daerah
- c. penyelenggaraan koordinasi tugas perangkat daerah
- d. penyelenggaraan kebijakan daerah
- e. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kebijakan daerah
- f. pembinaan aparatur perangkat daerah
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah
- h. penyelenggaraan pelayanan administrasi Sekretariat Daerah
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.3.3. Jumlah ASN Sekretariat Daerah Kota Semarang

Tabel 2.8

Rekap Jumlah Pegawai ASN Sekretariat Daerah Kota Semarang
Periode 2017 - Januari 2020

November 2017	November 2018	November 2019	Januari 2020
246	230	226	237

sumber: BKPP Kota Semarang dan Sekretariat Daerah Kota Semarang,
diolah 2020

Berdasarkan tabel 2.8 jumlah Pegawai ASN Sekretariat Daerah Kota Semarang di atas menjelaskan bahwa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir jumlah Pegawai Pemerintah Kota Semarang di Sekretariat Daerah mengalami fluktuatif dengan jumlah terbanyak terjadi pada tahun 2017 tercatat sebesar 246 orang, kemudian di tahun 2018 jumlah pegawai turun menjadi 230 orang, kemudian di tahun 2019 kembali turun menjadi 226, namun mengalami peningkatan jumlah di awal tahun 2020 sebanyak 237 dikarenakan adanya mutasi pegawai ASN ke dalam Sekretariat Daerah Kota Semarang ataupun ke OPD lain, selain itu jumlah ASN yang pensiun juga lebih besar dibandingkan dengan jumlah ASN yang diterima oleh Pemerintah Kota Semarang.

Mengenai komposisi jumlah pegawai ASN dari setiap bagian Sekretariat Daerah untuk periode Januari 2020 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.9
Jumlah Pegawai ASN Sekretariat Daerah Kota Semarang
Periode Januari 2020

No	Asisten	Bagian	Jumlah ASN
1	Asisten Administrasi Pemerintahan	Tata Pemerintahan	18
		Otonomi Daerah	21
		Hukum	18
		Organisasi	15
2	Asisten Administrasi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat	Perekonomian	10
		Adminstrasi Pembangunan	13
		Kesejahteraan Rakyat	14
		Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	17
3	Asisten Administrasi Umum	Humas dan Protokol	26
		Tata Usaha	37
		Perlengkapan	9
		Rumah Tangga	28
4	Staf Ahli	Bidang Pemerintahan	1
		Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	1
		Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	1
5	Kelompok Jabatan Fungsional		8
Jumlah			237

sumber: Sekretariat Daerah Kota Semarang, diolah 2020

Berdasarkan tabel 2.9 jumlah Pegawai ASN Sekretariat Daerah Kota Semarang di atas menjelaskan bahwa jumlah Pegawai Pemerintah Kota Semarang di Sekretariat Daerah periode bulan bulan Januari tercatat sebesar 237 orang. Di dalam organisasi perangkat daerah tersebut dibagi

menjadi 3 Asisten yang di dalamnya terdapat 4 bagian masing-masing, 3 Staf Ahli, dan Kelompok Jabatan Fungsional yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing.

Menurut Peraturan Walikota Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Semarang yaitu setiap asisten memiliki tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan dalam perumusan, penyelenggaraan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah bidangnya masing-masing.

Staf ahli merupakan unsur pembantu walikota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah, serta kelompok jabatan fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.

2.3.4. Rekap Usia Pegawai ASN Sekretariat Daerah Kota Semarang

Tabel 2.10
Rekap Usia Pegawai ASN Sekretariat Daerah
Periode November 2019

No	Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	21 – 30 tahun	11	6	17
2	31 – 40 tahun	28	27	55

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	41 – 45 tahun	42	37	79
4	51 – 60 tahun	52	23	75
5	61 – 65 tahun	0	0	0
Jumlah		133	93	226

sumber: BKPP Kota Semarang, diolah 2019

Berdasarkan tabel 2.10 rekap usia pegawai ASN Sekretariat Daerah Kota Semarang di atas menjelaskan bahwa di OPD tersebut periode bulan November tahun 2019 yang paling banyak di dominasi oleh pegawai ASN laki-laki dengan jumlah 133 orang, ASN dengan rentang usia yang paling besar adalah di usia 41 sampai 45 tahun jumlah sebesar 79 orang yang didominasi oleh ASN laki-laki sebanyak 42 orang dan ASN perempuan sebanyak 37 orang. Sedangkan rentang usia yang paling sedikit adalah 21 sampai 30 tahun sebanyak 17 orang, berdasarkan tabel tersebut pula menunjukkan bahwa tidak ada ASN Sekretariat Daerah yang berusia 61 sampai 65 tahun.

2.3.5. Rekap Pendidikan Pegawai ASN Sekretariat Daerah Kota Semarang

Tabel 2.11

Rekap Pendidikan Pegawai ASN Sekretariat Daerah Kota Semarang
Periode November 2019

No	Dasar Pendidikan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Sekolah Dasar (SD)	1

(1)	(2)	(3)
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2
3	Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/K)	58
4	Diploma I (D1)	0
5	Diploma II (D2)	0
6	Diploma III (D3)	5
7	Sarjana (S1) / Diploma IV (D4)	119
8	Magister (S2)	40
9	Doktor (S3)	1
Jumlah		226

sumber: BKPP Kota Semarang, diolah 2019

Berdasarkan tabel 2.11 rekap pendidikan Pegawai ASN Sekretariat Daerah Kota Semarang di atas menjelaskan bahwa pendidikan terakhir ASN di Sekretariat Daerah Kota Semarang periode bulan November tahun 2019 yang paling banyak adalah tingkat pendidikan terakhir Sarjana (S1) / Diploma IV (D4) sebanyak 119 orang. Sedangkan tingkat pendidikan ASN yang paling sedikit adalah Sekolah Dasar (SD) dan Doktor (S3) yang masing-masing sebanyak 1 orang.

**1.3.8 Rekap Jabatan dan Golongan Pegawai ASN Sekretariat Daerah
Kota Semarang**

Tabel 2.12
Rekap Golongan Ruang Pegawai ASN Sekretariat Daerah
Periode November 2019

No	Golongan Ruang	Jumlah
1	I/a (Juru Muda)	0
2	I/b (Juru Muda Tingkat I)	0
3	I/c (Juru)	0
4	I/d (Juru Tingkat I)	0
5	II/a (Pengatur Muda)	2
6	II/b (Pengatur Muda Tingkat I)	2
7	II/c (Pengatur)	22
8	II/d (Pengatur Tingkat I)	11
9	III/a (Penata Muda)	26
10	III/b (Penata Muda Tingkat I)	56
11	III/c (Penata)	40
12	III/d (Penata Tingkat I)	38
13	IV/a (Pembina)	11
14	IV/b (Pembina Tingkat I)	11
15	IV/c (Pembina Utama Muda)	7
16	IV/d (Pembina Utama Madya)	0
17	IV/e (Pembina Utama)	0
Jumlah		226

sumber: BKPP Kota Semarang, diolah 2019

Berdasarkan tabel 2.12 rekap golongan ruang Pegawai ASN Sekretariat Daerah Kota Semarang di atas menjelaskan bahwa golongan ruang ASN Sekretariat Daerah Kota Semarang periode bulan November tahun 2019 yang paling banyak adalah golongan III/b atau Penata Muda Tingkat I yaitu sebanyak 56 orang. Sedangkan golongan ruang yang paling sedikit adalah golongan II/a dan II/b yang masing-masing sebanyak 2 orang.

Tabel 2.13
Rekap Jabatan Eselon Pegawai ASN Sekretariat Daerah Kota Semarang
Periode November 2019

No	Jabatan Eselon	Jumlah
1	Pimpinan Tinggi (I/a, I/b, II/a, II/b)	7
2	Administrator (III/a, III/b)	11
3	Pengawas (IV/a, IV/b)	36
4	Pelaksana (Jabatan Fungsional Umum)	163
5	Fungsional (Jabatan Fungsional Tertentu)	9
Jumlah		226

(sumber: BKPP Kota Semarang, diolah 2019)

Berdasarkan tabel 2.13 rekap jabatan Pegawai ASN Sekretariat Daerah Kota Semarang berdasarkan eselon di atas menjelaskan bahwa

jabatan eselon ASN Pemerintah Kota Semarang di Sekretariat Daerah periode bulan November tahun 2019 yang paling banyak adalah jabatan fungsional umum sebanyak 163 orang, jabatan fungsional umum merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

Contoh Jabatan fungsional umum atau pelaksana yaitu analis kesekretariatan terkait perencanaan, informasi dan dokumentasi, hubungan masyarakat, hukum, kepegawaian dan lain sebagainya. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ditentukan oleh Sekretariat Daerah.

Sedangkan jabatan eselon yang paling sedikit adalah pimpinan tinggi yang terdiri dari golongan eselon I/a, I/b, II/a, dan II/b sebanyak 35 orang. Pimpinan tinggi dalam Sekretariat Daerah Kota Semarang yaitu, Sekretaris Daerah Kota Semarang merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonisasi II/a, asisten dan staf ahli merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonisasi II/b, kepala bagian merupakan jabatan administrator dengan eselonisasi III/a, dan kepala subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselonisasi IV/a.

2.4. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Berbasis Teknologi Kota Semarang (Simpatik)

Pemanfaatan *e-government* melalui penetapan kebijakan *smart city* untuk pegawai pemerintah Kota Semarang diwujudkan dengan adanya aplikasi pelayanan kepegawaian yang diluncurkan pertama kali pada awal tahun 2014 yaitu e-kinerja, namun pada saat itu e-kinerja belum memenuhi seluruh kebutuhan pelayanan pegawai ASN sehingga dengan evaluasi bertahun-tahun pada tahun 2018 dibuat aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Berbasis Teknologi yang kemudian disingkat Simpatik sebagai perbaikan dari aplikasi sebelumnya. Simpatik merupakan sebuah aplikasi yang dikelola oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang dan ditujukan sebagai bentuk pelayanan kepegawaian secara online untuk seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Semarang.

2.4.1. Aktor yang Terlibat dalam Penerapan Aplikasi Simpatik

Dalam proses penerapan aplikasi Simpatik tentu ada aktor yang terlibat, mulai dari perumusan, pelaksanaan hingga pengelolaannya. Beberapa aktor yang memiliki kewenangan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Walikota Semarang

Walikota Semarang tentunya memiliki peran yang cukup kuat dalam penerapan aplikasi pelayanan kepegawaian. Hal ini dikarenakan walikota Semarang merupakan pimpinan tertinggi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang memiliki tanggungjawab besar dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu untuk melancarkan

proses pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi yang tertulis dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2016-2021 salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan dengan pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar maupun sarana dan prasarana penunjang, maka Pemerintah Kota Semarang menciptakan sebuah inovasi khusus bagi seluruh pegawai ASN dengan tujuan memberikan kemudahan pelayanan untuk menunjang kinerja para pegawai ASN. Dengan adanya inovasi ini diharapkan akan memberikan output yang dapat dirasakan langsung oleh pegawai.

2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang memiliki peran yang sangat vital dalam proses penerapan aplikasi Simpatik. Hal ini dikarenakan bahwa Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berwenang menjalankan urusan pemerintahan terkait kepegawaian, sehingga sistem operasional aplikasi Simpatik dikoordinasi secara langsung.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang melaksanakan pembagian tugas dengan memberikan kewenangan kepada Bidang Administrasi Kepegawaian, Subbidang Data dan Informasi Pegawai sebagai pengelola sistem operasional aplikasi Simpatik. Selain itu, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang juga berperan aktif dalam proses

perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi Simpatik.

3) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Semarang

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Semarang memiliki peran sebagai portal pengembangan aplikasi Simpatik, dalam pelaksanaannya melalui Diskominfo, jaringan aplikasi Simpatik disatukan menjadi satu server bersama yaitu *Cloud Computing*. *Cloud* diartikan sebagai internet dan *Computing* sebagai komputer, sehingga dapat diartikan bahwa *Cloud Computing* adalah proses pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama.

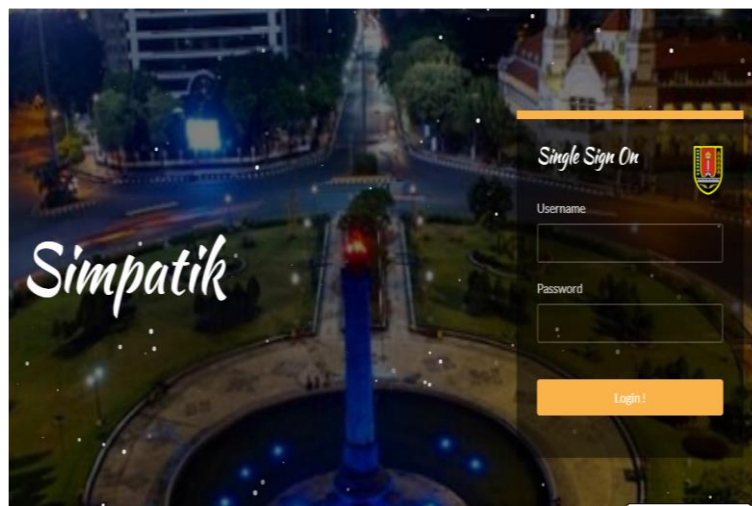
Cloud Computing merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. *Cloud Computing* memudahkan penggunanya untuk menjalankan program tanpa harus mengunduh aplikasi terlebih dahulu dan memudahkan pengguna untuk mengakses data dan informasi melalui internet, kemudian seluruh data pengguna akan tersimpan dalam virtual server yang bernama *Cloud Storage*. Data yang tersimpan pada virtual sever tersebut akan tetap tersimpan dalam server pusat dan jika pengguna memerlukan data tersebut, maka dapat diakses secara langsung.⁴

⁴ Laman Resmi PT Cloud Hosting Indonesia. Mengenal Apa Itu Cloud Computing: Definisi, Fungsi, dan Cara Kerja. www.idcloudhost.com. Diakses pada hari Minggu, 12 April 2020 pukul 19.46 WIB

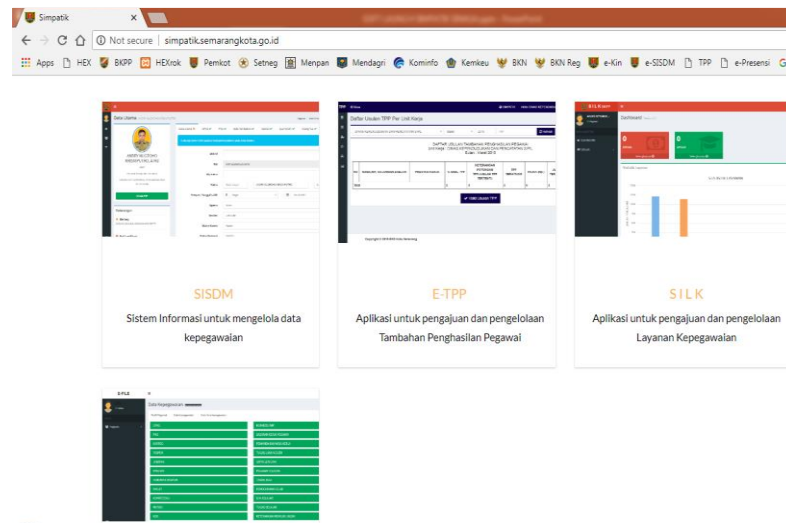
2.4.2. Sistem Pelayanan yang Terdapat dalam Aplikasi Simpatik

Aplikasi Simpatik menggunakan metode teknologi SSO (*Single Sign On*). Teknologi SSO merupakan teknologi login terpusat dimana sistem-sistem yang berbeda dapat terintegrasi dengan satu *user account* yang valid.⁵ Simpatik memang dibentuk khusus untuk aparatur pemerintah digunakan untuk penilaian kinerja dari PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan juga sebagai aplikasi pelayanan kepegawaian. Adanya aplikasi Simpatik diharapkan terjadi peningkatan kualitas dari pegawai, karena dengan adanya Simpatik maka para pekerja yang menunjukkan kinerja yang baik akan mendapatkan apresiasi yang baik pula tetapi para pekerja yang kinerjanya buruk maka akan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang telah dikerjakan.

Gambar 2.4 Tampilan Aplikasi Simpatik



⁵ Bkd.jatengprov.go.id. diakses pada Senin, 1 Juli 2019 pukul 08.00



Dalam Simpatik terdapat beberapa aplikasi kepegawaian yaitu e-SISDM (Sistem Informasi Sumber Daya Manusia), e-File, e-Kinerja, e-Presensi, e-TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai), dan e-SILK (Sistem Informasi Layanan Kepegawaian) yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1) e-SISDM (Sistem Informasi Sumber Daya Manusia)

e-SISDM merupakan sistem informasi yang dikembangkan oleh BKPP Kota Semarang untuk mengelola data-data induk ASN di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. SISDM wajib diisi secara aktif oleh masing-masing pegawai, karena difungsikan sebagai data induk maka data-data pegawai di SISDM menjadi acuan bagi sistem informasi lain yang terintegrasi di lingkungan BKPP. Selain itu SISDM juga digunakan untuk mencetak FIP (Formulir Isian Pegawai) dan membuat data statistik periodik terkait data-data kepegawaian.

Gambar 2.5 Tampilan e-SISDM

The screenshot displays the 'Data Utama' (Main Data) page for Bambang Sukono, MM. The page features a profile card on the left with a photo, name, and ID (195812251984111001). The main content area contains a form with the following fields:

BKN Id	ABACA74E0F05912E040640A0402698B
NIP	195812251984111001
Nip Lama	010177248
Nama	Drs BAMBANG SUKONO MM
Tempat / Tanggal Lahir	Banjarnegara 25-12-1958
Agama	Islam
Gender	Laki-Laki

Navigation tabs at the top include: Data Utama, CPNS, PNS, Data Tambahan, Alamat, Suami/Istri, Orang Tua, Foto, and Riwayat. A blue notification box contains the following text:

1. Apabila terdapat kesalahan pada Data Utama silahkan update data dan upload file pendukung di riwayat.
2. File pendukung diupload dalam bentuk file PDF (kecuali foto) ukuran maksimal 2Mb.

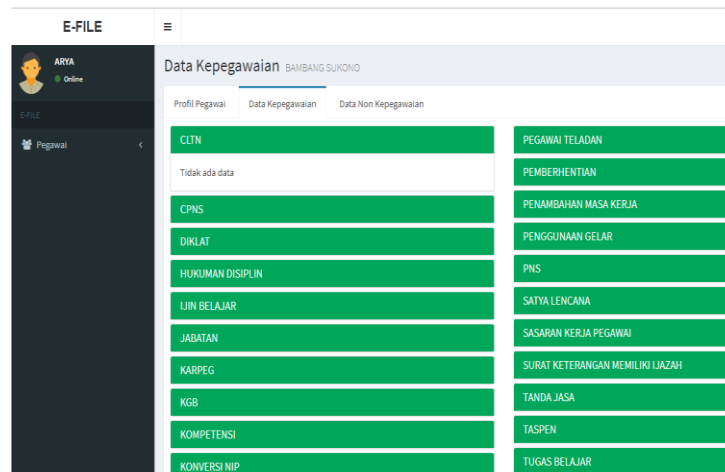
Sistem Informasi Sumber Daya Manusia berisi:

- a. Data Utama
- b. Data Tambahan meliputi alamat, KTP, KK, KIS, NPWP, dll
- c. Data CPNS dan PNS
- d. Data Orang Tua
- e. Data Suami / Istri
- f. Data Anak
- g. Riwayat Kepangkatan
- h. Riwayat Jabatan
- i. Riwayat Hukuman Disiplin
- j. Riwayat Diklat
- k. Riwayat Pengembangan Kompetensi
- l. Riwayat Mutasi
- m. Riwayat Pendidikan
- n. Penguasaan Bahasa
- o. Riwayat CLTN (Cuti diluar Tanggungan Negara)

2) e-File

e-File merupakan sistem informasi terkait dengan data kepegawaian maupun non kepegawaian yang disimpan dalam bentuk digital. Arsip digital ini nantinya akan dipergunakan untuk memenuhi syarat-syarat pengajuan layanan kepegawaian secara *paperless*, sehingga ASN tidak perlu lagi mengajukan berkas secara manual.

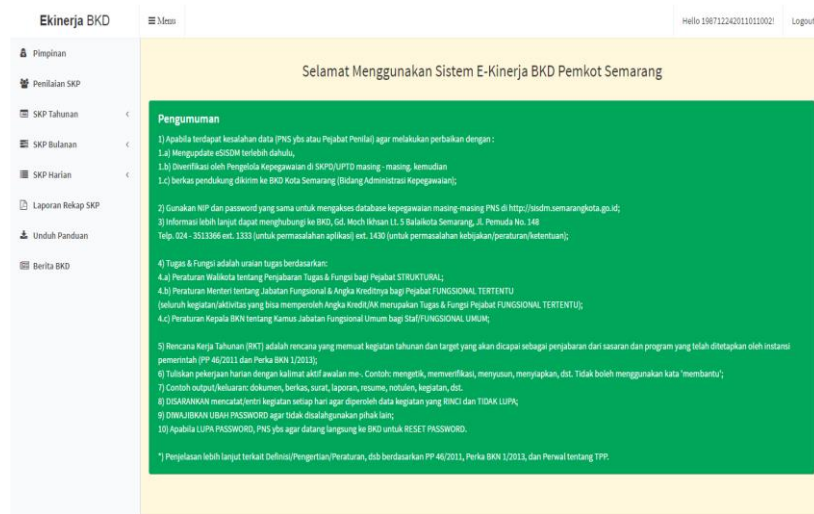
Gambar 2.6 Tampilan e-File



3) e-Kinerja

e-Kinerja (atau biasa disingkat e-Kin) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh BKPP untuk memfasilitasi ASN di Kota Semarang dalam menyusun SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) secara online dengan berdasarkan pada prinsip transparan dan partisipatif. Tahun 2017 e-Kinerja dapat langsung terhubung dengan E-TPP sehingga pengajuan Tambahan Penghasilan Pegawai lebih mudah, transparan, dan menuju *paperless*.

Gambar 2.7 Tampilan e-Kinerja



e-Kinerja memfasilitasi pegawai dalam:

- a. Penyusunan target SKP Tahunan
- b. Penyusunan target SKP Bulanan
- c. Penyusunan realisasi SKP Harian (catatan kinerja harian)
- d. Penyusunan realisasi SKP Bulanan
- e. Penyusunan Prestasi Kerja Bulanan
- f. Penyusunan realisasi SKP Tahunan
- g. Penyusunan Prestasi Kerja Tahunan
- h. Pencatatan Perilaku Pegawai (oleh atasan)

Output e-Kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Laporan SKP dan Prestasi Kerja Bulanan
- b. Laporan SKP dan Prestasi Kerja Tahunan
- c. Catatan Kerja Harian

4) e-Presensi

e-Presensi merupakan sistem informasi yang dikembangkan oleh BKPP untuk pencatatan *real time* kehadiran pegawai menggunakan sidik jari secara online dan terintegrasi, serta dapat dimonitor langsung oleh BKPP. Aplikasi ini mencatat kehadiran pegawai secara langsung kemudian dikirim ke server e-presensi.

Gambar 2.8 Tampilan e-Presensi



The screenshot displays the 'LAPORAN ABSENSI PEGAWAI' (Employee Absence Report) interface. At the top, there are navigation links for 'DASHBOARD' and 'PRESENSI', and a user profile for 'ENDANG NUR WIDYASTUTI'. Below this, there are buttons for 'KEMBALI' and 'CETAK'. The main title is 'LAPORAN ABSENSI PEGAWAI', followed by the employee's NIP (195901041988032001) and name (ENDANG NUR WIDYASTUTI, MM). The report is for the period 'Validasi ATASAN/U. KERJA/S. KERJA/BKD'. The data is presented in a table with columns for No., HARI/TGL MASUK, JAM MASUK, +/-, JAM PULANG, +/-, DURASI, VALIDASI, STATUS, and KETERANGAN. The table shows a week of data from January 1st to 8th, 2017, with various absence statuses like 'Libur', 'Masuk', 'TD', and 'TD-Abs Pulang'.

No.	HARI/TGL MASUK	JAM MASUK	+/-	JAM PULANG	+/-	DURASI	VALIDASI	STATUS	KETERANGAN
1	Minggu/2017-01-01							Libur	
2	Senin/2017-01-02						****	Belum Konfirmasi	
3	Selasa/2017-01-03	06:17:08	00:42:52	17:21:36	02:06:36	11:04:28		Masuk	
4	Rabu/2017-01-04	07:20:38	-00:20:38	15:40:50	00:25:50	08:20:12	xxvxx	TD	
5	Kamis/2017-01-05	07:13:40	-00:13:40	00:00:00	-15:15:00	-07:13:40	****	TD-Abs Pulang	
6	Jumat/2017-01-06	07:22:54	-00:22:54	13:24:36	01:54:36	06:01:42	xxvxx	TD	
7	Sabtu/2017-01-07							Libur	
8	Minggu/2017-01-08							Libur	

5) e-TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai)

e-TPP merupakan sistem informasi yang dikembangkan oleh BKPP untuk mengelola besaran / jumlah TPP yang diterima oleh pegawai dengan berdasar pada eselon, golongan, tingkat disiplin (presensi) dan capaian kinerja (SKP) dari masing-masing pegawai. Di aplikasi e-TPP ini juga dapat dilihat riwayat besaran tambahan penghasilan pegawai yang diterima pegawai tiap bulannya termasuk rekap ketidakhadiran tiap bulan. Mulai tahun 2017, e-TPP menarik langsung nilai SKP masing-masing pegawai yang dicatat di aplikasi

e-Kinerja sehingga proses pengajuan usulan TPP lebih cepat dan transparan.

Gambar 2.9 Tampilan e-TPP



6) e-SILK (Sistem Informasi Layanan Kepegawaian)

e-SILK merupakan sistem informasi yang dikembangkan oleh BKPP untuk memfasilitasi pegawai dalam mengajukan permohonan layanan kepegawaian sekaligus memudahkan BKPP dalam mengelola permohonan layanan kepegawaian secara online dan *paperless*. Layanan Online yang sudah terbangun antara lain:

- a. Si Naga (Sistem Informasi Kenaikan Gaji Berkala)
- b. Si Pijar (Sistem Informasi Pengajuan Ijin Belajar)
- c. Sejati (Sistem Pengajuan Ijin Cuti)
- d. e-Ujian Dinas (Pendaftaran Peserta Ujian Dinas)

Gambar 2.10 Tampilan e-SILK

